

ANALISIS SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG

Bayu Purnomo Aji¹, I Ketut Kirya², Gede Putu Agus Jana Susila³

Jurusan Manajemen, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja
e-mail: bayoe.purnomo@gmail.com, ketutkirya@yahoo.co.id, janos_undiksha@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini didasari oleh turunnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2011 dan 2012. Sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah, penerimaan PAD sebaiknya harus terus meningkat. Tujuan diadakannya penelitian ini untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi sumber-sumber PAD Tahun Anggaran 2009-2013, estimasinya untuk Tahun Anggaran 2014, serta proyeksi efektivitas dan kontribusi pada tahun 2014. Desain penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan pada dinas pendapatan daerah Kabupaten Buleleng. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi lalu dianalisis dengan rasio efektifitas, rasio kontribusi dan analisis trend. Hasil penelitian ini menyatakan efektivitas sumber PAD Tahun Anggaran 2009-2013 berada pada kategori sangat efektif dengan rata-rata 112,48%. Sedangkan kontribusi terbesar pada Tahun Anggaran 2009-2013 diperoleh dari lain-lain PAD yang sah sebesar 43,13%. Estimasi sumber PAD Tahun Anggaran 2014 menunjukkan seluruhnya mengalami peningkatan penerimaan dari tahun lalu kecuali retribusi daerah. Efektivitas penerimaan sumber PAD tahun 2014 memiliki kategori sangat efektif dengan rata-rata sebesar 110,89%. Terakhir kontribusi tertinggi tahun 2014 diperoleh dari lain-lain PAD yang sah sebesar 51,34%.

Kata kunci: efektivitas, kontribusi, *trend*

Abstract

This study is based on the decline in the growth of local income revenue (PAD) in the fiscal years 2010 and 2011. As one of the sources of local financing, PAD reception should have to continue to rise. The objective of this study was to examine the effectiveness and contribution of PAD sources for Fiscal Year 2009-2013, the estimate for Fiscal Year 2014, and the projected effectiveness and contribution in 2014. The design of this study is quantitative descriptive. The study was conducted at the offices of regional income Buleleng regency. Data used are secondary data. Data were collected and analyzed by the method of documentation, and then data analyzed with effectiveness ratio, contribution ratio and trend analysis. The results of this study stated the effectiveness of PAD resource for Fiscal Year 2009-2013 is the category of very effective with an average of 112.48%. While the largest contribution in Fiscal Year 2009-2013 was obtained from other legal PAD by 43.13%. Estimates for Fiscal Year 2014 of PAD sources show entirely increased revenues from last year except for retribution. Effectiveness reception of PAD sources in 2014 has a very effective category with an average of 110.89%. Last highest contribution in 2014 was obtained from other PAD legitimate by 51.34%.

Keywords : *effectiveness, contribution, trend*

1. Pendahuluan

Sesuai dengan sistem pemerintahan Indonesia yaitu desentralisasi, maka pembangunan bangsa ini dimulai dari pembangunan daerah/provinsi. Masing-masing daerah menggali dan mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya yang nantinya akan menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah. Adanya otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah dapat mengatur jalannya pemerintahan di daerah pimpinannya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk mengurangi peran pemerintah dalam mengatur tiap-tiap daerah diseluruh Indonesia yang jumlahnya sangat banyak. Dengan demikian kerja pemerintah pusat dapat lebih fokus ke arah perumusan kebijakan makro.

Adanya otonomi daerah akibat dari diterapkannya sistem pemerintahan desentralisasi mengharuskan pemerintah daerah untuk mengelola dan memajukan daerahnya. Hal ini tentu

tidak terlepas dari pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Terkait hal tersebut perlu adanya penerimaan/pendapatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. salah satu sumber pendapatan tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang dihasilkan oleh daerah bersangkutan, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Potensi yang dimiliki suatu daerah harus terus dipacu sehingga hasilnya dapat maksimal.

PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya dan merupakan salah satu faktor pendukung yang menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi di daerah (Riduansyah, 2003). Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dapat dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu daerah bagian dari Provinsi Bali yang juga melaksanakan otonomi daerah seperti daerah lainnya. Serangkaian pemasukan dari berbagai sektor diharapkan dapat memberikan sumbangan yang maksimal dalam proses pembangunan daerah sehingga otonomi daerah dapat berjalan dengan lancar. Pada setiap tahun penerimaan PAD selalu mengalami peningkatan. Namun dalam beberapa tahun pertumbuhan PAD mengalami penurunan. Pada tahun 2011 dan tahun 2012 PAD Kabupaten Buleleng mengalami penurunan pertumbuhan. Tahun 2011 menurun 11,44% dan tahun 2012 kembali menurun 7,36% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut tentu menjadi suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan mengingat pentingnya peran PAD dalam pembangunan daerah. Kendati pada tahun 2013 yang lalu pertumbuhan PAD mengalami peningkatan, namun peningkatan pertumbuhan tersebut tidak sebanding dengan besar penurunan yang dialami sebelumnya.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- (1) Untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2009-2013.
- (2) Untuk mengetahui estimasi realisasi masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2014.
- (3) Untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2014.

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat praktis bagi Perguruan Tinggi khususnya para akademisi sebagai tambahan referensi dan informasi mengenai perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Buleleng. Serta bagi pemerintah daerah hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu dapat juga mengetahui potensi yang diberikan oleh masing-masing sumber sehingga dapat memaksimalkan sektor yang dominan memberikan kontribusi kepada PAD Kabupaten Buleleng.

Sistem pemerintahan sentralisasi atau terpusat banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah manajer atau yang berada pada posisi puncak dalam suatu struktur organisasi atau pemerintahan. Jatuhnya rezim Orde Baru diiringi dengan terbentuknya era reformasi menginginkan sistem pemerintahan yang demokratis, maka terbentuklah sistem pemerintahan baru yang dikenal dengan desentralisasi. Dengan adanya sistem desentralisasi ini keputusan dan kebijakan di daerah dapat diputuskan pemerintahan daerah,

sehingga keputusan dan kebijakan yang ditetapkan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing.

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *outos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 5 menyebutkan, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Suparmoko, 2002:61). Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat, (Widjaja, 2001:76).

Melalui otonomi daerah ini diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara wajar, efisien dan efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada masyarakat (Widjaja, 2001:7).

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan Kabupaten/Kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

(1) Kewenangan Otonomi Luas

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan di bidang lainnya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Otonomi Nyata

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah.

(3) Otonomi yang Bertanggung Jawab

Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sehat antar pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sistem atau kebijakan apapun yang diterapkan pada suatu pemerintahan tidak terlepas dari keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Senada dengan hal tersebut, otonomi daerah dalam proses penyelenggaraannya juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Secara ringkas berikut keunggulan diterapkannya otonomi daerah.

(1) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota mampu melihat kebutuhan yang mendasar pada daerahnya untuk menjadi prioritas pembangunan.

(2) Dengan dilaksanakannya otonomi daerah maka pembangunan di daerah tersebut akan maju, berkembang dalam pembangunan daerah, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan rakyat.

(3) Daerah-daerah dapat mengatur sendiri tata kelola pemerintahannya.

(4) Pemerintah daerah bersama-sama rakyat akan membangun daerah untuk kemajuan dan kepentingan bersama.

Otonomi daerah sebagai penerapan dari sistem pemerintahan desentralisasi juga tidak lepas dari sejumlah kelemahan, adapun kelemahan-kelemahan tersebut sebagai berikut.

- (1) Pemerintah daerah yang mengatur daerahnya dengan menetapkan perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- (2) Kontrol/pengawasan pemerintah pusat lemah.
- (3) Rentan terjadi permasalahan di daerah.
- (4) Peraturan yang ditetapkan pemerintah pusat terkadang tidak sesuai dengan kondisi daerah tertentu.
- (5) Sering terjadi perbedaan kemajuan antar daerah otonom.

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. Menurut Widjaja (2003:42) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah serta merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha suatu daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah guna membiayai kebutuhan pembangunan sendiri untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah wilayahnya. Untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

(1) Pajak Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2008). Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan dapat dilakukan dengan menetapkan pajak.

Menurut Mardiasmo (2009:5) jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi (1) menurut golongan, (2) menurut sifat, (3) menurut lembaga pemungutnya. Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Menurut lembaga pemungutan, pajak dibedakan atas pajak Negara atau pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) dan sebagai alat pengatur (*regulatory*). Fungsi penerimaan (*budgeter*) yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan fungsi pengatur (*regulatory*) pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Rahardjo, 2010:72)

(2) Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah (Suandy, 2008:239). Menurut Halim (2008:97), retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin trayek kendaraan penumpang, retribusi air, retribusi jembatan timbang, retribusi kelebihan muatan dan retribusi perijinan pelayanan dan pengendalian. Menurut Mangku Soebroto (1985:182) retribusi adalah pungutan pemerintah

karena pembayar menerima jasa tertentu dari pemerintah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam tiga golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2004, mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

(4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah dan komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah.

Menurut Mardiasmo (2002:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuannya maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Efektivitas digunakan untuk membantu menganalisis sejauh mana realisasi penerimaan daerah berhasil mencapai potensi atau target yang harus dicapai pada satu periode tertentu. Tentu setiap daerah mengharapkan penerimaan realisasi pendapatannya mencapai atau bahkan melebihi target yang ditetapkan. Dengan terpenuhinya target yang telah terpenuhi artinya daerah tersebut telah mampu mencapai tujuannya dengan efektif. Menurut Mahsun (2006:187) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Analisis Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan seluruh pendapatan asli daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah sehingga dengan adanya data tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tindakan atau kebijakan yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan peran seluruh penerimaan daerah (Abdul Halim, 2002).

Model *trend* biasanya digunakan untuk memprediksi suatu persoalan (membuat ramalan jangka panjang), adapun bentuk umum dari model *trend* linier ini dinyatakan dengan persamaan $\hat{Y} = a + bX$ (Supangat, 2007:168). Analisis *trend* merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Secara teoritis, dalam analisis *time series* yang paling menentukan adalah kualitas atau keakuratan dari informasi atau data yang diperoleh serta waktu atau periode dari data tersebut dikumpulkan. Jika data yang dikumpulkan tersebut semakin banyak maka semakin baik pula estimasi atau peramalan yang diperoleh. Sebaliknya, jika data yang dikumpulkan semakin sedikit maka hasil estimasi atau peramalannya akan semakin buruk.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pemasukan finansial yang diperoleh dari berbagai sektor dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah. Peningkatan PAD ini penting bagi suatu daerah karena itulah sumber untuk dapat melaksanakan berbagai macam program guna pembangunan daerah.

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dan keempat bagian tersebut merupakan sumber-sumber pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio efektivitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah

dalam mencapai realisasi atas target yang diberikan. Rasio kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peran masing-masing sumber PAD dalam pembentukan PAD itu sendiri. Proses analisis PAD ini menggunakan data aktual dan riil Tahun Anggaran 2009-2013.

Selain menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggunakan data aktual dan riil yang telah ada, dan juga akan membuat estimasi atau prediksi PAD Kabupaten Buleleng untuk tahun 2014 dengan menggunakan analisis *trend* dengan berdasar data tahun 2009-2013. Dengan analisis *trend* ini memungkinkan untuk melakukan estimasi dan menganalisis data pada tahun-tahun selanjutnya. Masing-masing sumber PAD tahun anggaran 2009-2013 akan dianalisis menggunakan analisis *trend*, sehingga menemukan persamaan *trend*. Setelah itu, persamaan *trend* tersebut akan digunakan untuk menghitung dan mengestimasi sumber-sumber PAD pada tahun anggaran 2014. Sumber PAD tersebut akan dicari besar efektivitas dan kontribusinya dalam tahun anggaran 2014. Hasil dari perhitungan ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak atau lembaga yang membidangi pendapatan daerah.

2. Metode

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Variabel yang terlibat dalam penelitian ini yaitu sumber-sumber pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Subjek penelitian ini adalah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Sedangkan objek penelitiannya adalah laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2009-2013.

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah arsip Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Buleleng. Data yang digunakan adalah laporan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2009-2013 yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) rasio efektivitas, (2) rasio kontribusi, dan (3) analisis *trend*.

3. Hasil Dan Pembahasan

Kabupaten Buleleng merupakan daerah berbukit yang membentang di bagian selatan, sedangkan di bagian utara merupakan dataran rendah. menjadikan Kabupaten Buleleng memiliki berbagai macam jenis produk pertanian dan perkebunan yang dapat dihasilkan. Tanaman padi dan palawija, buah-buahan seperti mangga, rambutan, alpokat, pisang, jeruk, sawo, durian, jambu, papaya, nenas, salak, anggur, semangka, strawberry, dan melon tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Serta sayur-sayuran yang dominan dihasilkan di Kecamatan Sukasada. Kabupaten Buleleng memiliki potensi dalam sektor perikanan. Penangkapan ikan laut dan budidaya produk laut seperti ikan kerapu, mutiara, dan rumput laut sudah banyak dilakukan. sektor perdagangan sangat berkembang di Kota Singaraja, dilihat dari menjamurnya berbagai macam pertokoan kecil, hingga mall yang tersebar di Kabupaten Buleleng. (Buleleng dalam Angka, 2013).

1. Rasio Efektivitas dan Kontribusi Tahun 2009-2013

Tabel 1 Efektivitas Sumber PAD Tahun Anggaran 2009-2013.

Sumber PAD	Efektivitas	Keterangan
Pajak Daerah	111,61%	Sangat Efektif
Retribusi Daerah	124,34%	Sangat Efektif
Kekayaan Daerah	108,03%	Sangat Efektif
Lain-lain PAD	105,97%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah

Berikut adalah rincian efektivitas masing-masing sumber PAD.

- (1) Efektivitas pajak daerah Tahun Anggaran 2009-2013 rata-rata sebesar 111,61%, dengan perolehan terbesar terjadi pada tahun 2013 sebesar 120,50%.
- (2) Efektivitas retribusi daerah Tahun Anggaran 2009-2013 rata-rata sebesar 124,34%, dengan perolehan terbesar terjadi pada tahun 2010 sebesar 143,93%.
- (3) Efektivitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2009-2013 rata-rata sebesar 108,03%, dengan perolehan terbesar terjadi pada tahun 2011 sebesar 126,82%.
- (4) Efektivitas lain-lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2009-2013 rata-rata sebesar 105,97%, dengan perolehan terbesar terjadi pada tahun 2010 sebesar 112,11%.

Tabel 2 Kontribusi Sumber PAD Tahun Anggaran 2009-2013.

Sumber PAD	Kontribusi	Keterangan
Pajak Daerah	22,81%	Sedang
Retribusi Daerah	20,20%	Sedang
Kekayaan Daerah	9,08%	Sangat Kurang
Lain-lain PAD	43,13%	Baik

Sumber: Data diolah

Berikut adalah kontribusi masing-masing sumber PAD yang dijelaskan sebagai berikut.

- (1) Kontribusi pajak daerah Tahun Anggaran 2009-2013 cukup berfluktuasi pada setiap tahunnya. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 22,81% dengan kontribusi tertinggi diberikan pada tahun 2013 sebesar 36,04%
- (2) Kontribusi retribusi daerah Tahun Anggaran 2009-2013 juga berfluktuasi pada setiap tahunnya. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 20,20% dengan kontribusi tertinggi diberikan pada tahun 2009 sebesar 58,48%.
- (3) Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2009-2013 juga berfluktuasi pada setiap tahunnya. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 9,08% dengan kontribusi tertinggi diberikan pada tahun 2011 sebesar 10,25%.
- (4) Kontribusi lain-lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2009-2013 berfluktuasi pada setiap tahunnya. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 43,13% dengan kontribusi tertinggi diberikan pada tahun 2010 sebesar 57,61%.

2. Hasil Analisis Trend Tahun 2014

Tabel 3 Estimasi/Peramalan Sumber PAD Tahun Anggaran 2014.

Sumber PAD	Estimasi/Peramalan
Pajak Daerah	Rp. 63.710.878.993
Retribusi Daerah	Rp. 13.738.298.342
Kekayaan Daerah	Rp. 13.412.804.290
Lain-lain PAD	Rp. 98.540.319.818

Sumber: Data Diolah

Hasil estimasi sumber PAD tahun 2014 semuanya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya kecuali retribusi daerah dengan perolehan terbesar dari lain-lain PAD yang sah.

3. Estimasi Efektivitas dan Kontribusi Sumber PAD Tahun Anggaran 2014.

Tabel 4 Estimasi Efektivitas Sumber PAD Tahun Anggaran 2014.

Sumber PAD	Efektivitas	Keterangan
Pajak Daerah	92,37%	Efektif
Retribusi Daerah	104,82%	Sangat Efektif
Kekayaan Daerah	105,36%	Sangat Efektif
Lain-lain PAD	121,17%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah

Proyeksi efektivitas sumber PAD tahun 2014 juga dikategorikan sangat baik dengan rata-rata keseluruhan 110,89%. Penerimaan terbesar diperoleh dari lain-lain PAD yang sah sebesar 121,17%.

Tabel 5 Estimasi Kontribusi Sumber PAD Tahun Anggaran 2014.

Sumber PAD	Kontribusi	Keterangan
Pajak Daerah	36,17%	Baik
Retribusi Daerah	7,80%	Sangat Kurang
Kekayaan Daerah	7,62%	Sangat Kurang
Lain-lain PAD	55,95%	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah

Kontribusi terbesarnya diperoleh dari lain-lain PAD yang sah dengan besar 55,95%. Sedangkan kontribusi terkecil adalah kekayaan daerah dengan 7,62%.

Berdasarkan hasil dari analisis rasio efektivitas sumber-sumber penerimaan PAD yang telah dilakukan, dapat dikemukakan bahwa sumber-sumber PAD memiliki tingkat efektivitas yang sangat baik selama Tahun Anggaran 2009-2013. Hal itu diketahui dari rata-rata tingkat efektivitas masing-masing sumber PAD pada tahun anggaran tersebut mencapai lebih dari 100% dan berada pada kategori sangat efektif.

Tingkat efektivitas suatu penerimaan PAD sebaiknya selalu tinggi atau mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini penting dalam kaitannya dengan pembiayaan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang sumber dananya juga berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Efektivitas yang tinggi merupakan salah satu keberhasilan suatu organisasi. Hal ini senada dengan pendapat Mardiasmo (2002:134) yang menyatakan efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Penelitian sebelumnya juga telah dilakukan oleh Bobby (2014) yang menggunakan rasio efektivitas dalam melakukan penelitian pada dinas pengelola keuangan daerah Blitar.

Berdasarkan perhitungan kontribusi sumber-sumber PAD maka dapat ditemukan hasil bahwa lain-lain PAD yang sah merupakan penyumbang terbesar kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Buleleng. Maka daeri itu sumber-sumber PAD yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan PAD harus tetap dijaga konsistensinya bahkan ditingkatkan. Namun tidak serta merta meninggalkan sumber penerimaan yang lainnya karena potensi suatu daerah tidak hanya terletak pada satu atau sebagian sumber.

Sesuai dengan yang disampaikan Abdul Halim (2002) analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan seluruh pendapatan asli daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah. penelitian sebelumnya terkait rasio kontribusi juga pernah

dilakukan oleh Bobby (2014) dalam penelitiannya pada dinas pengelola keuangan daerah Blitar.

Analisis trend untuk masing-masing sumber PAD pada tahun 2014 tidak semua mengalami kenaikan. Berbeda dengan ketiga sumber penerimaan PAD lainnya yang menunjukkan hasil positif pada estimasi tahun 2014 dengan menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Retribusi daerah adalah satu-satunya sumber penerimaan PAD yang diestimasi akan mengalami penurunan.

Tujuan analisis *trend* adalah untuk mengetahui perubahan posisi keuangan atau kinerja suatu perusahaan, dalam hal ini adalah pemerintah daerah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Analisis *trend* juga dapat digunakan untuk mengestimasi/memproyeksikan sumber PAD dalam jangka waktu panjang. Penelitian sebelumnya terkait analisis trend pernah dilakukan oleh Maxwell Taluke (2013) yang melakukan penelitian pada PAD di Kabupaten Halmahera Barat.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilihat dari hasil perhitungan rasio efektivitas secara keseluruhan menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat efektif. Retribusi daerah memperoleh efektivitas tertinggi dengan 124,34%, lalu pajak daerah 111,61%, kekayaan daerah 108,03% dan terakhir lain-lain PAD 105,97%. Sedangkan kontribusi sumber PAD terhadap PAD Kabupaten Buleleng selama Tahun Anggaran 2009-2013 didominasi oleh penerimaan yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah dengan total rata-rata 43,13% yang dikategorikan memiliki kontribusi yang baik. Selanjutnya pajak daerah, retribusi daerah dan kekayaan daerah masing dengan kontribusi 28,94%, 20,20% dan 9,08%. (2) Hasil proyeksi sumber-sumber PAD untuk Tahun Anggaran 2014 menunjukkan bahwa hanya retribusi daerah yang memperoleh hasil estimasi negatif dibandingkan dengan tahun lalu. Selebihnya pajak daerah pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD menunjukkan hasil yang positif dengan proyeksi yang melebihi dari tahun sebelumnya. (3) Efektivitas sumber PAD yang telah diproyeksikan dalam Tahun Anggaran 2014 menunjukkan hasil yang sangat baik. Retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD dikategorikan ke dalam efektivitas yang sangat baik, masing-masing 104,82%, 125,21 dan 121,17. Sedangkan efektivitas pajak daerah sebesar 92,37 dengan kategori efektif. Kontribusi sumber-sumber PAD yang diestimasi ke dalam Tahun Anggaran 2014 menunjukkan lain-lain PAD sebagai penyumbang terbesar pada PAD Kabupaten Buleleng sebesar 51,34%, disusul dengan pajak daerah sebesar 33,19%, kekayaan daerah 8,31% dan terakhir retribusi daerah 7,16%.

Saran dari hasil penelitian ini adalah (1) pengawasan penerimaan PAD harus diperketat agar tidak ada oknum yang memanfaatkannya, sehingga hasilnya dapat digunakan dengan bijak untuk pembangunan daerah (2) memberikan perhatian yang lebih terhadap sumber PAD yang memberikan kontribusi besar tanpa mengabaikan sumber penerimaan yang lain, dan (3) membuat peraturan daerah baru yang sesuai dengan perkembangan dan kondisi, agar mendapatkan pemasukan daerah dari sumber-sumber penerimaan yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmitha, Rahardjo, 2010, Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang, PT. Graha Ilmu, Jakarta.

Andi, Supangat. 2007. *Statistika: Dalam Kajian Deskriptif Inferensi dan Non Parametrik* Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta
....., 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Halim, Abdul. 2008. *Auditing I*. Yogyakarta: UPP AMR YKPN.

- Haris, Syamsuddin. 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta : LIPI Pres
- Hidayat, Paidi dan Sirojuzilam, 2006. *Kajian Tentang Keuangan Daerah Kota Medan di Era Otonomi Daerah*. Jurnal Wahana Hijau, Vol. 2, No.1.
- Mahmudi, 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN
- Mahsun, Mohammad, 2006, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset
- Mohammad Riduansyah, 2003, *Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah Terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*, Makara, Sosial Humaniora, Vol. 7, No. 2, Desember 2003, Pusat Pengembangan dan Penelitian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok 16425, Indonesia.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Edisi Revisi. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Sadono Sukirno, 1994. *Pengantar Teori Makroekonomi*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suandy, Erly. 2006. *Perpajakan Edisi 2*. Salemba Empat.
- Sugiyono, Prof. Dr. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Sukmadinata. , 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi. Yogyakarta
- Widjaja, HAW. 2003. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
-(2001). *Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada.